

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1986, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hanityo Sumitro, Ronny, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Masduki, Teten dan Fadjar, Mauktie, 2003, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, In Trans, Malang
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Cetakan 2*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Nawawi Arif, Barda, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi dan Priyatno, Dwidja, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Cetakan 4*, Kencana Prenadamedia, Jakarta

- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Saleh, Wantjik, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Surachmin dan Cahaya, Suhandi, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 1990, *Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yahya Harahap, M., 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Ed. 2 Cet. 4*, Sinar Grafika, Jakarta

2. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1960 tentang Pengubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 19)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Perpu Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya
- Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Website

- Transparency International, Corruption preception index (CPI) 2013, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruptionperception-index-2013>, diakses pada tanggal 3 Mei 2014

Indonesian Corruption Watch (ICW), Tren Pemberantasan Korupsi 2013, [http://www. antikorupsi.org /id/content/tren-pemberantasan-korupsi-2013](http://www.antikorupsi.org/id/content/tren-pemberantasan-korupsi-2013) , diakses pada tanggal 3 Mei 2014

Hukum Online, Hukuman Mati Bagi Koruptor perlukah?, [http://-www.hukumonline.com/berita/baca/hol7486/hukuman-mati-bagi-koruptor-perlukah.html](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7486/hukuman-mati-bagi-koruptor-perlukah.html), diakses pada tanggal 15 November 2014

Sindonews, Gerakan Memiskinkan Koruptor, <http://nasional.sindonews.com/read/750508/18/gerakanmemis-kinkankoruptor-137143-6210.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2015